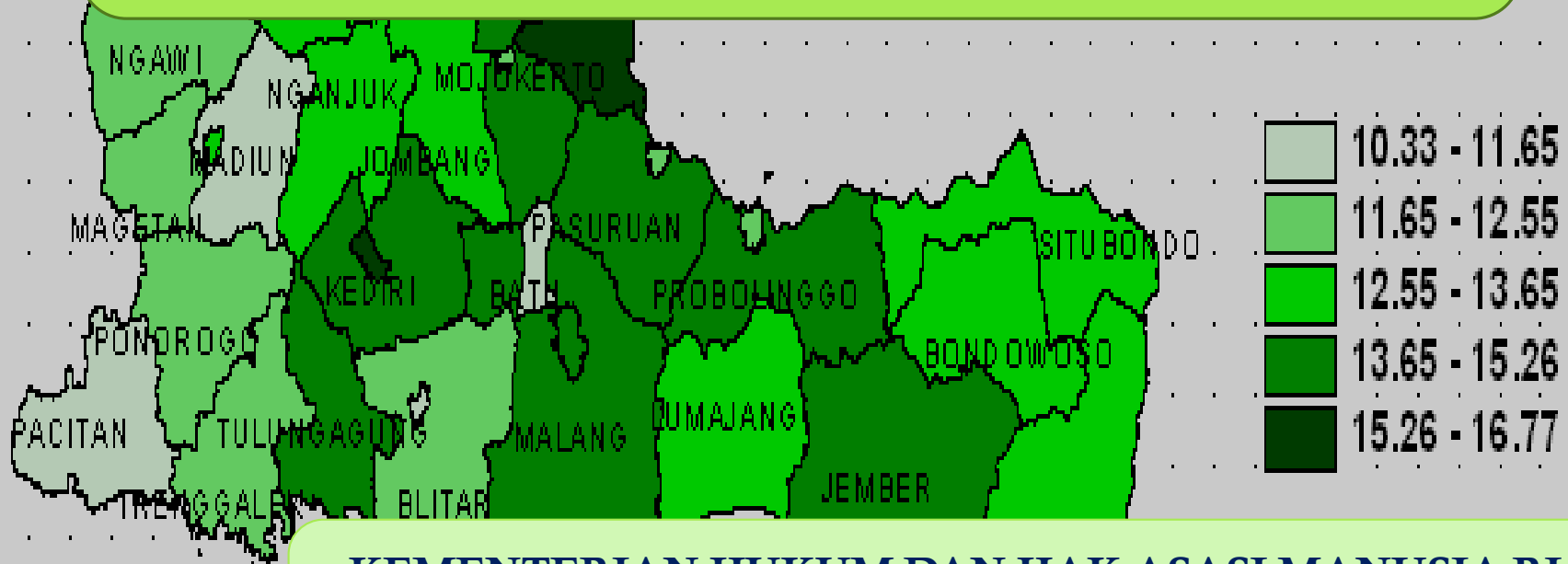




PENGAYOMAN



EVALUASI dan STRATEGI PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM *Tahun 2019*



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
2019**

Tujuan Pelaksanaan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM:

- Memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM
- Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan
- Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM

INDIKATOR PENILAIAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI
HAK ASASI MANUSIA

Kriteria Daerah
Kabupaten/Kota
Peduli HAM
didasarkan pada
terpenuhinya:

- hak atas kesehatan;
- hak atas pendidikan;
- hak perempuan dan anak;
- hak atas kependudukan;
- hak atas pekerjaan;
- hak atas perumahan yang layak; dan
- hak atas lingkungan yang berkelanjutan

PENERIMA PENGHARGAAN KKPHAM JAWA TIMUR

2013

1 penghargaan
Kab/Kota
Peduli
HAM
diterima
**KOTA
SURABAYA**

2014

1. Kota Kediri
2. Kab Nganjuk
3. Kab Malang
4. Kota Malang
5. Kota Batu
6. Kab Pacitan
7. Kota Surabaya

2015

1. Kab Ponorogo
2. Kab Nganjuk
3. Kab Lumajang
4. Kab Jombang
5. Kota Surabaya
6. Kab Pacitan
7. Kab Blitar
8. Kab Tuban
9. Kab Pasuruan
10. Kab Bojonegoro
11. Kab Mojokerto
12. Kota Batu
13. Kab Malang

2016

38
Kab/Kota
mendapat
kan peng-
hargaan
Kab/Kota
Peduli
HAM



2017

35 Kab/
Kota
mendapat
kan peng-
hargaan
Kab/Kota
Peduli
HAM

3 Kab/
kota
cukup
Peduli

2018

35 Kab/
Kota
mendapat
kan peng-
hargaan
Kab/Kota
Peduli
HAM

3 Kab/
kota
cukup
Peduli

**KAB/KOTA PEDULI HAM DI JAWA TIMUR
TAHUN 2019**

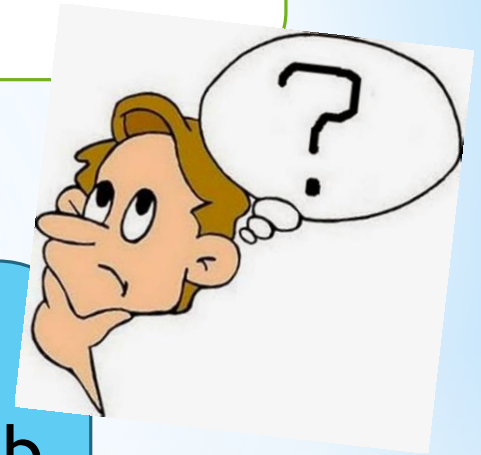


PERUBAHAN DALAM SISTEM PENILAIAN TAHUN 2019

1. Adanya evaluasi terhadap permasalahan HAM dan permasalahan hukum yang mempengaruhi kinerja pemenuhan HAM dan Pelayanan HAM terhadap masyarakat
2. Adanya penilaian inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

Table Permasalahan Hukum dan HAM
kab/Kota

**PERMASALAHAN DALAM *UP LOADING*
DATA DUKUNG PERSIAPAN KAB/KOTA
PEDULI HAM DI JAWA TIMUR**



1. Mutasi Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data KKPHAM di Wilayah kab/Kota

**PERMASALAHAN DALAM *UP LOADING*
DATA DUKUNG PERSIAPAN KAB/KOTA
PEDULI HAM DI JAWA TIMUR**

2. Belum maksimalnya dukungan OPD dalam kegiatan pengumpulan data kriteria Kab/kota Peduli HAM (koordinasi kurang maksimal)



**PERMASALAHAN DALAM *UP LOADING*
DATA DUKUNG PERSIAPAN KAB/KOTA
PEDULI HAM DI JAWA TIMUR**

3. Data yang diminta dalam indikator tidak sesuai data di lapangan



**PERMASALAHAN DALAM *UP LOADING*
DATA DUKUNG PERSIAPAN KAB/KOTA
PEDULI HAM DI JAWA TIMUR**

4. Data yang diminta dalam indikator bukan kewenangan pemerintah kab/kota



**PERMASALAHAN DALAM *UP LOADING*
DATA DUKUNG PERSIAPAN KAB/KOTA
PEDULI HAM DI JAWA TIMUR**



5. Menurunnya semangat pelaksana /pejabat yang melakukan pengumpulan data dukung (perlu ada reward ?)

REKOMENDASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL HAM:

1. Memperbaiki indikator sesuai data di lapangan
2. Meningkatkan pemberian penghargaan kab/kota Peduli HAM melalui tingkatan-tingkatan tertentu untuk menghalau kejenuhan dan mempertahankan semangat untuk mendapatkan penghargaan
3. Memberikan reward bagi Kab/kota yang mendapatkan penghargaan tertinggi berupa kesempatan untuk mengikuti acara-acara internasional atau nasional (studi tiru

REKOMENDASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL HAM:

4. Melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke wilayah-wilayah kab/kota yang belum optimal dalam memberikan perhatian
5. Koordinasi berkelanjutan bukan hanya dengan pemerintah daerah provinsi, namun juga dengan kantor wilayah untuk berbagi persoalan yang mungkin berbeda dan beragam
6. Penilaian bukan hanya dari indikator yang telah ditetapkan, namun juga inovasi-inovasi pelayanan yang telah dilakukan menjadi penilaian tambahan

REKOMENDASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL HAM:

7. Bila ada perubahan indikator sebaiknya diawal tahun diumumkan, dan harus melalui perubahan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar hukum yang legal bagi Kab/Kota untuk mengumpulkan data

REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA:

1. Koordinasi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan semangat melayani sehingga pemberian penghargaan KKPHAM bukan hanya terpaku pada pengumpulan data
2. Diperlukan Perhatian dari Pejabat pemangku kewenangan terhadap *deadline* pemngumpulan data, sehingga dapat melakukan manajemen waktu dengan baik.

REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA:

3. Koordinasi dan komunikasi dengan kanwil hukum dan HAM dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesulitan dan kesalahan dalam pengumpulan data

STRATEGI KANWIL HUKUM DAN HAM JATIM DALAM PERSIAPAN PENILAIAN KAB/KOTA TAHUN 2020

1. Sedini mungkin melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Penentuan Indikator penilaian Kab/kota Peduli HAM tahun 2020 yang telah mengalami perubahan
2. Melaksanakan Evaluasi kegiatan pengumpulan data bersama Direktorat Jenderal HAM untuk meminimize perubahan ditengan jalan
3. Melaksanakan koordinasi dengan 4 Pilar Pelaksana Kegiatan RAN HAM di tingkat Provinsi (Biro Hukum Serda Prov Jatim, Bappeda Jatim dan Bakebang Pol Jatim)

STRATEGI KANWIL HUKUM DAN HAM JATIM
DALAM PERSIAPAN PENILAIAN KAB/KOTA
TAHUN 2020

4. Melakukan Pembagian Tugas monitoring kewilayah Kab/Kota dengan 4 Pilar Pelaksana RANHAM, untuk pembinaan pengisian data
5. Koordinasi dengan Kab/kota untuk memaksimalkan Pengumpulan data dan mencari solusi bersama dalam permasalahan HAM

THANK YOU FOR BEING :

